

## Permasalahan dalam Implementasi Pendidikan Inklusi di Sumatera Utara

Angelia Selina<sup>1</sup>, Astifiona Anastasya Br.Sinuhaji<sup>2</sup>, Bethesda Ulfa Siagian<sup>3</sup>, Laura Debrina Tarigan<sup>4</sup>, Nia Damai Putri Br.Sitorus<sup>5</sup>, Nurul Fadilah Lubis<sup>6</sup>, Anggia Puteri<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan

e-mail: [angeliaselina1304@gmail.com](mailto:angeliaselina1304@gmail.com)<sup>1</sup>, [astifionaanasta@gmail.com](mailto:astifionaanasta@gmail.com)<sup>2</sup>,

[lauradebrina7@gmail.com](mailto:lauradebrina7@gmail.com)<sup>3</sup>, [Niadps9@gmail.com](mailto:Niadps9@gmail.com)<sup>4</sup>, [ya@gmail.com](mailto:ya@gmail.com)<sup>5</sup>,

[ulfasiagian1@gmail.com](mailto:ulfasiagian1@gmail.com)<sup>6</sup>, [nurulfadilalubis1@gmail.com](mailto:nurulfadilalubis1@gmail.com)<sup>7</sup>, [anggia@unimed.ac.id](mailto:anggia@unimed.ac.id)<sup>8</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam implementasi pendidikan inklusi di Sumatera Utara, serta mencoba menemukan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan studi kepustakaan. Instrumen kunci pada penelitian adalah peneliti sendiri. Tahap yang dilakukan dalam penelitian ada empat, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil yang ditemukan setelah menganalisis data terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusi di Sumatera Utara, seperti adanya stigma (pandangan negatif) terhadap pendidikan inklusi, terbatasnya sumber daya, serta kesiapan sekolah dan guru yang kurang memadai.

**Kata kunci:** *Pendidikan Inklusi, Implementasi, Masalah, Sumatera Utara*

### Abstract

This research aims to find and analyse the problems that occur in the implementation of inclusive education in North Sumatra, and try to find solutions that can be applied to overcome the problems that occur. The method used in this research is through a literature study approach. The key instrument in the research is the researcher himself. There are four stages in the research, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results found after analysing the data are several problems in the implementation of inclusive education in North Sumatra, such as the stigma (negative view) towards inclusive education, limited resources, and inadequate school and teacher readiness.

**Keywords:** *Inclusive Education, Implementation, Problems, North Sumatra*

### PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat (1) yang menyatakan: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Prinsip ini menegaskan bahwa karakteristik apapun dari warga negara, termasuk penyandang disabilitas atau yang kini dikenal dengan istilah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), tidak boleh menghalangi mereka dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagai warga negara, menurut Hemarto (2016, dalam Mukti, 2023: 762), ABK mempunyai hak yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dan masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia masih cukup tinggi, dengan perkiraan sekitar 1,6 juta anak.

Namun, hanya 18% dari mereka yang mendapatkan layanan pendidikan inklusi, dengan sekitar 115 ribu ABK bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan 299 ribu ABK bersekolah di sekolah reguler dengan program inklusi (Hidayat, 2024: 102). Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi ABK. Pendidikan inklusi sebagai alternatif dari sistem segregasi merupakan implementasi dari Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009. Sistem ini memungkinkan ABK dapat menempuh pendidikan di sekolah reguler bersama dengan siswa normal lainnya. Pendidikan inklusi berarti semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa dan agama menyatu dalam komunitas sekolah yang sama (Direktorat PPK LK Pendidikan Dasar, 2011). Melalui pendekatan ini, ABK diharapkan mendapatkan lebih banyak stimulus dan meningkatkan fungsi sosial dan emosional yang lebih positif, sehingga berkesempatan lebih diterima oleh teman sebaya, memiliki persepsi diri yang lebih baik, dan memiliki perilaku bermasalah lebih sedikit dibandingkan jika bersekolah di Sekolah Luar Biasa (Baroroh, 2022, dalam Mukti: 2023: 762).

Beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, telah mendeklarasikan diri sebagai penyelenggara pendidikan inklusi sejak tahun 2012 hingga 2016 (Hafiz, 2017). Meskipun pendidikan inklusi mendapat apresiasi luas dari masyarakat, implementasinya di Sumatera Utara masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Tantangan utama meliputi kurangnya kompetensi guru dalam menghadapi ABK, minimnya fasilitas pendukung, kurangnya kurikulum yang disesuaikan, dan beragam karakteristik ABK yang memerlukan pendekatan berbeda. Menurut Sunardi (2011, dalam Mukti, 2023: 763), kondisi ini menjadikan diskusi tentang pendidikan inklusi tetap strategis untuk dibahas, baik secara konseptual maupun empiris. Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusi di Sumatera Utara, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi sekolah dan tenaga pendidik. Pemahaman mendalam terhadap kendala ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk upaya perbaikan yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung pendidikan inklusi, sehingga dapat meningkatkan persentase ABK yang mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

## **METODE**

Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau literatur. Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menyusun ulang pemikiran dari berbagai penelitian terdahulu dan referensi ilmiah yang terkait dengan topik penelitian (Hermawan, dalam Hidayat, A., dkk., 2024: 103). Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusi. Instrumen utama dalam penelitian, yaitu peneliti karena yang menentukan dan mengkaji sumber data adalah tim peneliti secara bersama-sama.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi sejumlah jurnal, buku, dokumen, serta sumber data dan informasi lain yang relevan dengan penelitian. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca (Ameraldo & Ghazali, 2021). Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Sugiyono dalam (Pratiwi, dkk., 2022: 315) triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Setelah itu data dianalisis melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Tujuan Pendidikan Inklusi**

Pada tahun 2015 Sumatera Utara (Sumut) telah mendeklarasikan sebagai provinsi pendidikan inklusif di Indonesia, ada sekitar 633 sekolah telah menyatakan siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah yang tersebar di kabupaten/kota di Sumut ini, siap menerima anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk bersekolah di sekolah reguler. Badan Pusat Statistik mencatatkan terdapat sebanyak 285.982 Anak Berkebutuhan Khusus, dari 2.859.824 total anak usia sekolah di Sumatera Utara. Angka ini merujuk asumsi PBB yang menyebut setidaknya 10 persen dari jumlah anak usia sekolah (5-14 tahun) adalah penyandang kebutuhan khusus. Dan dari jumlah tersebut hanya 0.00018 persen yang dapat mengakses pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) dan 0,00012 persen ke SMP.

Kota Medan adalah ibu kota dari Sumatera Utara yang diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang diawali dengan kegiatan penyusunan pedoman penyelenggaraan sekolah inklusif, sosialisasi kepada berbagai komponen terkait dan secara simultan dilakukan perintisan sekolah inklusif di berbagai kecamatan di Kota Medan. Pendidikan inklusif diharapkan dapat menjadi salah upaya untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah (berkebutuhan khusus) dan dalam waktu bersamaan dapat meningkatkan pendidikan inklusif diharapkan mutu pendidikan (Prastiono, 2013:119).

Pendidikan inklusif secara tradisional dikaitkan dengan anak berkebutuhan khusus. Ilahi Takdir Muhammad (2013:183) menjelaskan bahwa peserta didik merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Handayani dan Angga (2013) memaparkan bahwa “terdapat kelompok lain yang tidak dapat mengenyam pendidikan dasar yaitu anak berkebutuhan khusus (ABK).

Pendidikan Inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata Education for All yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Pada titik ini tampak bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik kependidikan hanya karena perbedaan kondisi awal dan latarbelakangnya. Inklusifpun bukan hanya bagi mereka yang berkelainan atau luar biasa melainkan berlaku untuk semua anak. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anakanak berhasil (Stainback, 1980). Berdasarkan batasan tersebut pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan:(1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya; (2) Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar; (3) Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah; (4) Menciptakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. UU no 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. UU No 23/2002 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Tujuan pendidikan inklusi menurut Herawati (2021) adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.

Dalam mengimplementasikan Pendidikan Inklusif (PI), Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) memerlukan sistem dukungan yang kokoh untuk mempercepat pemenuhan akses dan mutu pendidikan untuk semua (Education for All). Sistem dukungan ini diberikan secara eksternal dan internal, dengan komponen utama berupa regulasi di tingkat Pemerintah Daerah. Regulasi menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama yang menegaskan prinsip penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak

diskriminatif. Kemudian, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memperkuat komitmen pemerintah dengan memberikan jaminan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, termasuk hak memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas mengatur lebih detail mengenai penyediaan sarana, prasarana, dan berbagai bentuk akomodasi yang diperlukan sesuai kebutuhan individual peserta didik. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 secara spesifik mengatur tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang menjadi acuan operasional bagi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebagai pelengkap, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk melakukan adaptasi kurikulum sesuai kebutuhan dan kondisi peserta didik. Rangkaian regulasi ini membentuk sistem dukungan yang komprehensif bagi SPPI dalam mengembangkan program pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas bagi semua peserta didik.

### **Implementasi Pendidikan Inklusi di Beberapa Sekolah di Sumatera Utara**

Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang penting dalam sistem pendidikan modern, terutama di Indonesia. Dalam pendidikan inklusi, semua siswa termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, diberikan kesempatan untuk belajar dalam lingkungan yang sama. Salah satu langkah awal dalam implementasi pendidikan inklusi adalah memahami karakteristik siswa berkebutuhan khusus. Untuk mengetahui persentase dan jenis kebutuhan anak, sekolah bisa merancang kurikulum dan strategi pembelajaran yang lebih tepat.

#### **a. Implementasi Pendidikan Inklusi di SDN Marelان Kota Medan**

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dahniar Harahap dan Nina Hastina di empat sekolah dasar di Marelان, Medan, menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi memiliki banyak tantangan tetapi juga peluang yang signifikan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar siswa dengan kebutuhan khusus memiliki kategori tunagrahita ringan, diikuti oleh tunagrahita sedang, kesulitan belajar, dan sangat sedikit yang merupakan siswa tunarungu.

##### **1) Sekolah Dasar Negeri No. 067261**

Sekolah ini menerapkan model kelas reguler dengan cluster, siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa non berkebutuhan khusus dalam kelompok khusus. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam lingkungan pembelajaran yang sama. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus merasa diterima dan mendapatkan dukungan yang diperlukan selama proses belajar, sehingga mendorong inklusi sosial dalam kelas.

##### **2) Sekolah Dasar Negeri No. 066429**

Seperti SDN No. 067261, sekolah ini juga mengimplementasikan model kelas reguler dengan cluster. Dengan menggunakan metode ini, siswa berkebutuhan khusus mendapatkan perhatian khusus dalam kelompok kecil sambil tetap berintegrasi dengan siswa reguler. Model ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian siswa berkebutuhan khusus, sambil memungkinkan siswa non berkebutuhan khusus untuk belajar tentang keragaman dan saling menghargai perbedaan.

##### **3) Sekolah Dasar Negeri No. 064007**

Sekolah ini mengadopsi model kelas reguler dengan pull out, siswa berkebutuhan khusus dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas reguler tetapi juga diberikan waktu di luar kelas untuk mendapatkan perhatian ekstra dari guru spesialis. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menerima dukungan individual yang mungkin mereka perlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka, sambil tetap terintegrasi dalam pengalaman belajar umum dengan teman-teman seusianya.

#### 4) Sekolah Dasar Negeri No. 064999

Sekolah ini menjalankan model kelas khusus penuh, semua siswa berkebutuhan khusus ditempatkan dalam satu kelas khusus yang disiapkan secara spesifik untuk kebutuhan mereka. Dalam lingkungan ini, mereka mendapatkan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual, yang memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang lebih efektif dan nyaman. Meskipun model ini memberikan perhatian khusus, tetap penting bagi sekolah untuk menciptakan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan siswa di luar kelas khusus agar tercipta rasa inklusi dan sosial yang lebih baik. Dengan berbagai pendekatan yang diambil oleh masing-masing sekolah, penempatan siswa berkebutuhan khusus dalam dua model yang berbeda (kelas reguler dengan cluster serta pull out, dan kelas khusus penuh) menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan individu siswa dan mendorong inklusi pendidikan di Medan.

#### b. implementasi Pendidikan Inklusi di SMA Kota Binjai

Implementasi pendidikan inklusif di SMA Kota Binjai sebagaimana diuraikan dalam artikel Rafael Lisinus dkk, melibatkan serangkaian langkah strategis yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dalam lingkungan pembelajaran yang sama dengan siswa reguler. Program ini dimulai dengan melibatkan Forum Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) di Kota Binjai, yang menjadi mitra utama dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui pendekatan kolaboratif, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga untuk menciptakan atmosfer yang inklusif bagi semua siswa. Langkah pertama dalam implementasi pendidikan inklusif adalah melakukan survei kebutuhan yang mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi oleh guru bimbingan konseling. Data ini berfungsi sebagai acuan untuk mengidentifikasi area-area spesifik yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal identifikasi dan penanganan siswa berkebutuhan khusus. Setelah data dikumpulkan, tim melaksanakan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) dengan para guru untuk menentukan langkah-langkah praktis yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Setelah langkah awal ini, pelaksanaan program dilanjutkan dengan mengadakan workshop intensif bagi guru bimbingan konseling. Melalui workshop ini, guru diberikan pelatihan praktis tentang cara mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, serta metode modifikasi kurikulum yang dapat digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Metode pengajaran yang diperkenalkan dalam workshop mencakup teknik-teknik diferensiasi dan penyesuaian strategi pengajaran yang mungkin diperlukan untuk mendukung perkembangan siswa.

Salah satu aspek penting dari program ini adalah penguatan pemahaman guru terhadap konsep pendidikan inklusif. Dalam sesi-sesi tersebut, guru diajak untuk mendalami panduan dan peraturan yang terkait dengan pendidikan inklusif, termasuk hukum yang mewajibkan penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas. Guru diharapkan dapat mengenali pentingnya kolaborasi antara semua pihak di lingkungan sekolah, termasuk orang tua dan anggota masyarakat lainnya, dalam mendukung siswa berkebutuhan khusus. Program ini juga berfokus pada penyediaan alat bantu yang diperlukan untuk mendukung proses belajar-mengajar. Alat bantu ini bisa meliputi aplikasi dan teknologi pendidikan yang dirancang untuk membantu siswa berkebutuhan khusus dalam memahami materi pelajaran. Dengan didampingi oleh guru yang terlatih, siswa dapat mengakses sumber daya ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi mereka dalam belajar. Program ini mendorong pengembangan unit layanan disabilitas di sekolah. Unit ini akan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan tambahan kepada siswa dan guru, serta memastikan bahwa lingkungan sekolah beradaptasi untuk memenuhi perspektif inklusif. Pihak sekolah diharapkan dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan siswa.

Pentingnya evaluasi dan monitoring juga ditekankan dalam program ini. Selama pelaksanaannya, tim melakukan pemantauan terhadap kemajuan guru dalam menerapkan metode yang telah diajarkan. Ini termasuk pengumpulan umpan balik dari peserta didik, serta laporan dari guru mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan

pendidikan inklusif. Monitoring yang berkala membantu memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan awal. Dalam proses ini, komunikasi yang baik antar guru, siswa, dan orang tua menjadi krusial. Keterlibatan orang tua dalam proyek pendidikan inklusif diharapkan dapat mengurangi stigma yang terkait dengan siswa berkebutuhan khusus dan memfasilitasi kerjasama yang lebih baik dalam mengatasi masalah yang muncul. Kolaborasi ini bukan hanya sekadar interaksi semata, tetapi membangun sebuah komunitas yang saling mendukung dan memahami kebutuhan pendidikan yang inklusif.

Setelah implementasi program, hasilnya dapat terlihat dari peningkatan kemampuan guru dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menyusun rencana pembelajaran individual. Selain itu, tersedia pula program bimbingan konseling yang lebih baik untuk siswa berkebutuhan khusus. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi semua siswa, di mana mereka bisa belajar tanpa adanya diskriminasi.

Secara keseluruhan, implementasi pendidikan inklusif di Kota Binjai mencerminkan komitmen untuk memberikan akses pendidikan yang adil bagi semua anak, terlepas dari latar belakang atau kebutuhan mereka. Melalui program ini, diharapkan semua siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang dan berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar, yang merupakan hak setiap anak.

## **Permasalahan Dalam Implementasi Pendidikan Di Sumatera Utara**

### **a. Stigma Dalam Pendidikan Inklusi**

Stigma adalah tanda atau stereotip negatif yang melekat pada individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks pendidikan inklusif, stigma dapat berdampak pada siswa dengan kebutuhan khusus, orang tua mereka, atau bahkan guru. Beberapa tantangan yang terkait dengan stigma dalam pendidikan inklusif meliputi:

1. Stigma Sosial: Siswa dengan kebutuhan khusus mungkin mengalami stigmatisasi dari teman-teman sebayanya yang tidak memahami kondisi mereka. Ini dapat mengakibatkan isolasi sosial dan kurangnya dukungan sosial.
2. Stigma dari Guru dan Staf Sekolah: Beberapa guru atau staf sekolah mungkin memiliki stigma terhadap siswa dengan kebutuhan khusus, dan ini dapat memengaruhi interaksi dan dukungan yang mereka berikan kepada siswa tersebut.

### **b. Keterbatasan Sumber Daya**

Tantangan keterbatasan sumber daya dalam pendidikan inklusif merupakan sebuah perjuangan yang harus dihadapi bersama. Anggaran yang cukup dan alokasi sumber daya yang bijaksana menjadi kunci untuk menyediakan dukungan yang diperlukan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Namun, tantangan ini juga merupakan panggilan untuk inovasi dan kolaborasi. Melalui kemitraan dengan komunitas, organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli, sekolah dan lembaga pendidikan dapat mendapatkan dukungan tambahan dalam bentuk dana, bahan, dan pengetahuan.

### **c. Kesiapan Sekolah Dan Guru**

Tantangan kesiapan sekolah dan guru dalam implementasi pendidikan inklusif adalah persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Kesiapan sekolah mencakup persiapan infrastruktur, kurikulum, serta budaya dan sikap sekolah yang mendukung inklusi. Di sisi lain, guru harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang cukup untuk mengajar semua siswa dengan kebutuhan khusus dengan efektif. Infrastruktur yang mendukung inklusi, seperti fasilitas yang dapat diakses oleh semua siswa, perlu diperbarui atau disesuaikan. Kurikulum juga harus dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa, dan ini mungkin memerlukan perubahan signifikan dalam metode pengajaran dan materi pembelajaran. Selain itu, budaya sekolah yang menerima keberagaman dan melibatkan semua siswa harus ditanamkan. Guru adalah kunci dalam pendidikan inklusif. Mereka harus memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus dan strategi pengajaran yang mendukung inklusi. Pelatihan guru yang berkelanjutan diperlukan agar mereka siap mengajar di lingkungan inklusif. Guru juga perlu memiliki keterampilan dalam mengelola kelas yang beragam, memahami perbedaan individu siswa, dan memberikan dukungan yang sesuai.

## Upaya Dan Solusi Mengatasi Permasalahan Pendidikan Inklusi

Stigma dalam Pendidikan Inklusi bisa menggunakan upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penerimaan dan dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Sekolah perlu mengimplementasikan program-program yang mendukung inklusi dan mengedukasi siswa tentang disabilitas dengan solusi melalui interaksi langsung, anak-anak dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik. Peran guru juga sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Guru harus dilatih untuk mengenali dan mengatasi stigma yang ada, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi siswa berkebutuhan khusus. Dukungan dari orang tua dan masyarakat juga sangat penting. Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak berkebutuhan khusus dapat membantu mengurangi stigma.

Keterbatasan Sumber Daya dengan upaya kemitraan dengan komunitas, organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli, sekolah dan lembaga pendidikan dapat mendapatkan dukungan tambahan dalam bentuk dana, bahan, dan pengetahuan menggunakan solusi alokasi anggaran yang cukup dan bijaksana untuk menyediakan dukungan yang diperlukan bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

Kesiapan Sekolah dan Guru dengan upaya pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang berhubungan dengan ke-disabilitas-an anak, serta sarana prasarana yang ramah disabilitas dan solusinya adalah infrastruktur yang mendukung inklusi, seperti fasilitas yang dapat diakses oleh semua siswa, perlu diperbarui atau disesuaikan. Kurikulum harus dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa, dan ini mungkin memerlukan perubahan signifikan dalam metode pengajaran dan materi pembelajaran. Pelatihan guru yang berkelanjutan diperlukan agar mereka siap mengajar di lingkungan inklusif. Guru juga perlu memiliki keterampilan dalam mengelola kelas yang beragam, memahami perbedaan individu siswa, dan memberikan dukungan yang sesuai.

Permasalahan Pendidikan di Sumatera Utara dengan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Pj. Gubernur memprioritaskan 23.666 lembaga pendidikan dari mulai TK sampai SMA sederajat. Pemerintah Provinsi terus berkomitmen melalui program strategi percepatan pelayanan dan kualitas pendidikan serta solusinya adalah pemerintah daerah memperhatikan basis data statistik pendidikan, sehingga capaian dalam menyelesaikan anak putus sekolah terukur, serta ada strategi pemerintah daerah terkait kasus tersebut.

## SIMPULAN

Pada tahun 2015, Sumatera Utara mendeklarasikan diri sebagai provinsi pendidikan inklusif di Indonesia, dengan 633 sekolah menyatakan siap menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka .

Implementasi pendidikan inklusif di Sumatera Utara menghadapi tantangan, terutama terkait dengan dukungan fasilitas, sumber daya manusia, dan finansial . Meskipun demikian, berbagai sekolah di Medan telah mengadopsi model kelas yang berbeda, seperti kelas reguler dengan cluster atau pull-out, serta kelas khusus penuh, untuk mengakomodasi kebutuhan individu siswa .

Pendidikan inklusif di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas . Tujuan utama pendidikan inklusif adalah untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman serta tidak diskriminatif

## DAFTAR PUSTAKA

Ameraldo, F., & Ghazali, N. A. M. (2021). Factors Influencing the Extent and Quality of Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Shari'ah Compliant Companies. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 960–984.

- Angga, H. D. (2013). Peraturan Perundangan Dan Implementasi Pendidikan Inklusif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*.(Online).
- Angraini, d. (2024). Pendidikan Inklusi sebagai Peran Penting dalam Memberikan Pendidikan Setara Kepada Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*,, 7(3), 6331-6338.
- Diajeng, R. A. (2022). Pendidikan Inklusif:Konsep, Implementasi, Dan Tujuan . Batam : Cv. Rey Media Grafika. 88-90.
- Direktorat PPK LK Pendidikan Dasar. (2011). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan
- Ginting, R. L., Irawan, M., Violina, E. I., Asiah, A., Nainggolan, E., & Munir, A. (2024). Rangkul Abk: Program Rintisan Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Konseling Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Di Kota Binjai Sumatera Utara. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3).
- Hafiz, A. (2017). Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal As-Salam*, 1(3), 9-15.
- Harahap, D. &. ((2020).). Model Kelas Penyelenggara Pendidikan Inklusif Di Sdn Medan. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, , 8(1), 60-671.
- Harahap, D., & Hastina, N. (2019). Model Kelas Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SDN Medan. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 28(1), 17-24.
- Hidayat, A. H., Rahmi, A., Nurjanah, N. A., Fendra, Y., & Wismanto, W. (2024). Permasalahan Penerapan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 102-111.
- Illahi, M. T. (2013). Pendidikan Inklusif : Konsep Dan Aplikasi. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Inklusif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mukti, H. D. (2023). Analisis Pendidikan Inklusif: Kendala dan Solusi dalam Implementasinya. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*. , 6(2): 761 – 777.
- Munauwarah, R. Z. (2021). Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas. Yasin :. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, , 1(1), 121-1284.
- Prastiono. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif. . *Jurnal Administrasi Publik*.(Online).
- Setiawan, F. &. (2023). Pelaksanaan Pelayanan Sosial Melalui Program Pendidikan Berbasis Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Yayasan Rumah Ceria, Medan, Sumatera Utara. . *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, , 5(1), 107-1183.
- Ulfah, D. J. ((2023). 57-62). Pendidikan Inklusif. *Prosiding Pendidikan*,. 57-62